**IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP BARANG
RAMPASAN AMMONIUM NITRATE HASIL TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN DI KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Oleh: Resma Dewi

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H., M.H.

Pembimbing II: Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Harmoko, No. 54A, Tanjungpinang, Kepulauan Riau

Email: dewiresma9@gmail.com / Telepon: 0895-6391-34480

ABSTRACT

The implementation of the court's decision on confiscated ammonium nitrate resulting from the crime of smuggling in Karimun Regency, Riau Islands Province, which has permanent legal force (inkracht van gewijsde) must execute by the provisions stipulated in Article 45 paragraph (4) Criminal Procedure Code that confiscation to be used for the benefit of the state or to be destroyed and defined by the Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-011/JA/10/1983 concerning the Settlement of Special Assets for Firearms, Gunpowder and Explosives item 2.3, namely confiscated goods cannot be an auction. In its implementation, there is a discrepancy between the legislation and the execution, namely the Karimun District Attorney has conducted an auction of some ammonium nitrate loot.

This type of research is sociological research conducted at the Karimun District Attorney's Office. Data collection techniques obtained by interview and literature study. The data were analyzed qualitatively, which produced descriptive data and concluded by a deductive method of thinking.

The result of this study is the implementation of the court's decision on the confiscation of ammonium nitrate resulting from a criminal act of smuggling in Karimun Regency, Riau Islands Province carried out through an execution auction and extermination. The obstacles in its implementation are: Contrary to the Regulation of the National Police Chief Number 17 of 2017 concerning Licensing, Security, Supervision, and Control of Commercial Explosives; There is no specific regulation about seized state asset ammonium nitrate; The issuance of a permit for the destruction of the seized state asset must publish by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia; The high cost of destroying seized state asset ammonium nitrate. Efforts made to overcome these obstacles were: The Karimun District Attorney's Office conducted education to the auction winners regarding the processing of ammonium nitrate transport permits; There is a need for special regulations regarding ammonium nitrate as a seized state asset; Execution must accomplish quickly and decisively; Require a budget for the destruction of the spoils of ammonium nitrate at the Karimun District Attorney's Office.

Keywords: Execution - Seized State Asset - Ammonium Nitrat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Karimun yang beribukota di Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu kabupaten yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Riau.

Posisi geografis Kabupaten Karimun yang strategis tidak hanya menimbulkan dampak yang menguntungkan dalam perekonomian, tetapi juga menimbulkan ancaman tersendiri salah satunya adalah dalam hal tindak pidana penyelundupan.

Salah satu kasus penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Karimun adalah penyelundupan *ammonium nitrate*.

Bahan peledak *ammonium nitrate* pada kasus tindak pidana penyelundupan *ammonium nitrate* di Kabupaten Karimun statusnya adalah sebagai barang bukti dan benda sitaan negara.

Setelah perkara diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan akan dilakukan eksekusi sesuai dengan bunyi amar putusan pengadilan yang tercantum dalam *vonis* sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesuai Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 273 ayat (3) KUHAP menyebutkan jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa. Serta di dalam ayat (4) menyebutkan bahwa jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama satu bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-011/J.A/10/1983 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Khusus Senjata Api, Mesiu dan Bahan Peledak butir 2.3, bahwa apabila amar putusan pengadilan menyatakan senjata api, amunisi, dan bahan peledak dirampas untuk negara, maka barang rampasan tersebut tidak dapat dilelang.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHAP juga menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Kategori yang termasuk dalam benda sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak, serta buku-buku atau gambar-gambar dan bentuk lain dari

barang-barang yang termasuk dalam kelompok pornografi.¹

Dalam implementasi enam putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan dalam amar putusannya menyatakan bahwa barang bukti *ammonium nitrate* dirampas untuk negara terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan yang telah diatur dengan eksekusi terhadap barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate*.

Menurut ketentuan terhadap barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate* yaitu sebagai bahan peledak tidak bisa dilelang. Dalam eksekusinya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Karimun telah melakukan pelelangan terhadap beberapa barang bukti *ammonium nitrate* tersebut dan sudah ada pemenang lelang namun barang tidak bisa diangkut oleh yang bersangkutan karena terhambat dengan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial yang sangat ketat mengenai izin pengangkutan barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan Ammonium Nitrate**

Hasil Tindak Pidana Penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana

¹ Richo Sumardana, “Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur)”, *Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No.3 November 2019, hlm. 538.

penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dalam menulis suatu karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia akademik.
- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam usaha peningkatan peran eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate*.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi yaitu prinsip yang mengasumsikan bahwa manusia bebas serta hanya dengan kebebasan tersebutlah manusia bisa dimintai pertanggungjawaban, maknanya

kepastian hukum timbul sebab adanya norma hukum yang telah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang menentukan sanksi yang dapat diberikan bagi tindakan melanggar hukum.²

Makna penting kepastian hukum pada esensinya adalah mengenai perlindungan dari tindakan kesewenangan dan letak nilai kepastian hukum berada pada saat tujuan dari hukum tercapai, maka hukum seharusnya dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri untuk membuktikan kepastiannya. Nilai kepastian hukum mencakup segala proses dalam penegakan hukum, dimulai dari tindakan sampai pada proses putusan pengadilan.³

2. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan upaya guna tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴

Menurut Soerjono Soekanto dalam melaksanakan penegakan hukum terdapat lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu: Faktor hukum; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan fasilitas; Faktor masyarakat; dan Faktor kebudayaan.⁵

² I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 205.

³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 193.

⁴ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 12.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 8.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan dan/atau penerapan.⁷
2. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸
3. Barang rampasan adalah barang milik negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara.⁹
4. *Ammonium nitrate* adalah senyawa dengan rumus kimia NH_4NO_3 yang sangat mudah larut dalam air sebagai bahan ramuan

pembuatan bahan peledak komersial.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kejaksaan Negeri Karimun yang terletak di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah: Jaksa Kejaksaan Negeri Karimun; Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; Kepala Sub Bagian Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau; dan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

b. Sampel

Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*.

⁶ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar, Vol. 1, No. 1 2010, hlm. 2.

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses, tanggal, 2 Oktober 2021.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 11.

⁹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/JA/05/2017

tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, Pasal 1 angka 12.

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pasal 1 angka 9.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS), Jakarta, 1986, hlm. 51.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber utama dengan cara wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- 3) Bahan Hukum Tersier

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Bahan Peledak dan *Ammonium Nitrate*

1. Pengertian Bahan Peledak

Bahan peledak merupakan bahan atau zat yang berwujud padat, cair, gas, atau campurannya yang jika dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah sebagian atau seluruhnya menjadi berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dengan jangka waktu yang amat singkat disertai

dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.¹²

2. Klasifikasi Bahan Peledak

Bahan peledak dapat diklasifikasikan berdasarkan pada komposisi senyawa kimia; kegunaannya; bahan baku; dan lingkungan penggunaannya.¹³

3. Perizinan Bahan Peledak

Produksi, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian bahan peledak dapat dilaksanakan oleh badan usaha apabila Menteri Pertahanan Keamanan telah memberikan izin.¹⁴ Apabila badan usaha tersebut melaksanakan kegiatan ekspor dan impor bahan peledak dan komponennya, maka izin didapatkan melalui menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri Pertahanan Keamanan.¹⁵

4. *Ammonium Nitrate*

Ammonium nitrate merupakan bahan ramuan dalam pembuatan bahan peledak komersial.

Penggunaan *ammonium nitrate* pada umumnya adalah sebagai pupuk pertanian, dalam pembuatan produk pertolongan pertama, dan sebagai bahan baku peledak pada industri pertambangan dan konstruksi.¹⁶

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pasal 1 angka 4.

¹³ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak, Pasal 3.

¹⁴ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak, Pasal 2 ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, Pasal 2 ayat (2)

¹⁶ Yohanes Genius Putu Sanjaya, "Kontra Terorisme Oleh Kepabeanaan Indonesia Penyelundupan Amonium Nitrat", *Journal of Terrorism Studies, School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia, Vol. 1, No. 2 November 2019*, hlm. 74.

B. Tinjauan Umum tentang Barang Rampasan Negara

1. Pengertian Barang Rampasan Negara

Barang rampasan negara adalah benda yang berasal dari benda sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terhadap benda tersebut dirampas untuk negara.¹⁷

2. Jenis Barang yang Dapat Dirampas

Terdapat dua jenis barang yang bisa dirampas, yaitu:¹⁸

- a. Barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari hasil kejahatan.
- b. Barang-barang milik terpidana yang sengaja dipakai dalam melakukan kejahatan.

3. Penyimpanan Barang Rampasan Negara

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP terhadap benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

4. Penyelesaian Barang Rampasan Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi dalam Pasal 14 menyatakan bahwa

penyelesaian barang rampasan negara dapat dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pengurusan dan pengelolaan.

Pengurusan barang rampasan negara dilaksanakan melalui sistem penjualan. Penjualan barang rampasan tersebut dilakukan dengan cara lelang, kecuali terhadap barang rampasan negara yang berasal dari Kejaksaan dan bernilai hingga Rp.35.000.000,00 maka dilakukan penjualan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kejaksaan; atau terhadap barang rampasan negara berupa saham perusahaan terbuka yang diperdagangkan dalam Bursa Efek maka dilakukan penjualan melalui sistem perdagangan di Bursa Efek dengan perantaraan Anggota Bursa.¹⁹

Apabila barang rampasan negara memerlukan pengelolaan tidak melalui penjualan atau barang tersebut tidak laku dijual lelang, maka dapat dilakukan pengelolaan barang rampasan negara. Pengelolaan barang rampasan negara meliputi:²⁰

- a. Penetapan status penggunaan;
- b. Pemindahtanganan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Pemusnahan; dan/atau
- e. Penghapusan.

¹⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Pasal 1 angka 4.

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 152.

¹⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, Pasal 14.

²⁰ *Ibid*, Pasal 15.

C. Tinjauan Umum tentang Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri

1. Pengertian Eksekusi Putusan Pengadilan

Eksekusi secara etimologi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*), secara terminologi eksekusi adalah melaksanakan putusan (*vonis*) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

2. Pengawasan dan Pengamatan Eksekusi Putusan Pengadilan

Pengawasan dan pengamatan eksekusi putusan pengadilan yang tercantum dalam KUHAP diatur dalam bab tersendiri, yaitu dalam Bab XX mulai Pasal 277 hingga Pasal 283.

3. Hapusnya Hak Eksekusi

Hapusnya pelaksanaan pidana dapat terjadi karena:²²

- a. Kematian terpidana;
- b. Daluwarsa;
- c. Grasi;

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau.

Tingkat kriminalitas di Kabupaten Karimun pada tahun 2020 terdapat 199 kasus kejahatan dengan kasus terbanyak adalah kasus pencurian dan pemberatan. Jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun di tahun 2020 adalah sebanyak 80 kasus dengan jumlah korban kejahatan pada tahun tersebut adalah 219 orang.²³

B. Gambaran Umum Kejaksan Negeri Karimun

Lembaga Kejaksaan yang berada di Kabupaten Tanjung Balai Karimun adalah Kejaksaan Negeri Karimun.

Kejaksaan memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak untuk diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; serta melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.²⁴

Tugas dan wewenang Kejaksaan Negara Republik Indonesia tercantum dalam KUHAP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.²⁵

²¹ Nugraha Abdul Kadir dan Chaerani Nufus, "Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Jurnalica*, Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul, Vol. 9, No. 1 April 2012, hlm. 39.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 103-104.

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, *Kabupaten Karimun dalam Angka*

2021, BPS Kabupaten Karimun, Karimun, 2021, hlm. 113.

²⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 64.

²⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 114.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan *Ammonium Nitrate* Hasil Tindak Pidana Penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

1. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan *Ammonium Nitrate* Hasil Tindak Pidana Penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Sistem pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilaksanakan melalui:²⁶

- a. Pengadilan memiliki Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) yang salah satunya bertugas untuk memastikan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan maupun Rutan.
- b. Kejaksaan membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan tembusan berita acara tersebut disampaikan kepada Pengadilan sebagai bukti bahwa Kejaksaan telah melaksanakan putusan pengadilan.
- c. Aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi digunakan sebagai sistem

²⁶ Wawancara dengan Alfonsius J.P. Siringo Ringo, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada 12 Januari 2022.

pengawasan secara elektronik yang dapat diakses oleh siapapun.

2. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Melalui Lelang Eksekusi

Pelelangan terhadap *ammonium nitrate* dilakukan karena *ammonium nitrate* mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk pada bidang pertanian.

Mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate* dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:²⁷

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun membuat surat yang ditujukan kepada KPKNL Batam untuk melakukan penilaian harga limit terhadap barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate*.
- b. Keputusan izin penjualan lelang barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate* dengan nilai sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) izin penjualan secara lelang diberikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun berdasarkan surat pelimpahan kewenangan Jaksa Agung yang secara fungsional dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- c. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun membentuk dan menetapkan panitia lelang

²⁷ Wawancara dengan Dhani Ranti, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Karimun, pada 12 Januari 2022.

untuk melakukan penjualan barang rampasan negara *ammonium nitrate* dengan surat keputusan.

- d. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun membuat surat perintah lelang barang rampasan negara *ammonium nitrate*.
- e. Panitia lelang mendaftarkan kelengkapan dokumen lelang ke KPKNL Batam melalui aplikasi dengan melampirkan dokumen.
- f. Setelah mendapatkan password, dalam jangka waktu 2 minggu Kepala Kejaksaan Negeri Karimun harus membuat surat permohonan penetapan jadwal lelang barang rampasan negara *ammonium nitrate*. secara *online* dan terbuka untuk umum yang didahului dengan penjelasan (*aanwijzing*) minimal satu hari sebelum pelaksanaan lelang tersebut.
- g. Terhadap peserta lelang mendaftar melalui aplikasi KPKNL Batam. Peserta lelang dapat melihat fisik barang rampasan melalui panitia lelang atau *aanwijzing* setelah mendapatkan password.

Hasil dari proses lelang yang dilakukan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* dengan nomor perkara 28/Pid.Sus/2011/PN.TBK telah laku dilelang, namun barang belum diambil oleh pemenang lelang karena karena terhambat dengan Peraturan Kapolri nomor

17 tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial. Sedangkan terhadap barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate* dengan nomor perkara 207/Pid.Sus/2012/PN.TBK dan 253/Pid.Sus/2015/PN.TBK telah dilakukan lelang eksekusi namun tidak ada penawaran.

Terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor perkara 279/Pid.Sus/2016/PN.TBK, 315/Pid.Sus/2016/PN.TBK, dan 111/Pid.Sus/2018/PN.TBK yang dalam amar putusannya dinyatakan dirampas untuk negara belum dilaksanakan lelang karena menunggu harga limit dari instansi terkait dan saat ini telah dilakukan pemusnahan dengan alasan *ammonium nitrate* termasuk salah satu bahan peledak.²⁸

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* melalui lelang seharusnya tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-011/J.A/10/1983 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Khusus Senjata Api, Mesiu dan Bahan Peledak butir 2.3, dan ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP.

²⁸ Wawancara dengan Destia, Jaksa Kejaksaan Negeri Karimun, pada 12 Januari 2022.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* seharusnya tidak dapat dilakukan eksekusi melalui pelelangan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Mekanisme Pelaksanaan Putusan Pengadilan Melalui Pemusnahan

Disebabkan proses lelang tidak dapat diselesaikan dan *ammonium nitrate* telah mengalami perubahan dari bentuk semula yaitu telah hancur atau pecah-pecah menjadi serbuk, maka Kejaksaan Negeri Karimun mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang mana dalam isinya meminta petunjuk dan bantuan terhadap penyelesaian barang rampasan negara tersebut.

Dalam hal pelaksanaan putusan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate*, atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau maka Asisten Bidang Pembinaan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun untuk diteruskan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA.²⁹

Dalam pengelolaan barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di

Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan melalui pemusnahan untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan dan risiko dalam penyimpanan *ammonium nitrate* tersebut.³⁰

Pada bulan September tahun 2020, dilakukan pemusnahan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Karimun. Pemusnahan dilakukan di halaman belakang kantor Kanwil DJBC Khusus Kepri di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Mekanisme pemusnahan barang rampasan berupa *ammonium nitrate* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Kepala Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan surat izin pemusnahan barang rampasan melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan melampirkan dokumen.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau meneliti kelengkapan dokumen tersebut, jika dokumen sudah lengkap Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melanjutkan surat tersebut ke Jaksa Agung Muda Pembinaan melalui Kepala PPA.
- c. Kepala Pusat Pemulihan Aset melakukan verifikasi untuk menentukan layak atau tidaknya barang rampasan

²⁹ Wawancara dengan Ansari, Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, pada 27 Januari 2022.

³⁰ Wawancara dengan Amrizal, Kepala Sub Bagian Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, pada 27 Januari 2022.

- negara tersebut untuk dimusnahkan.
- d. Kepala PPA mengajukan pertimbangan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan untuk memberikan izin tersebut melalui keputusan pemusnahan barang rampasan negara.
 - e. Berdasarkan keputusan pemusnahan barang rampasan negara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kepada KPKNL Batam untuk menerbitkan persetujuan pemusnahan barang rampasan.
 - f. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara oleh Kejaksaan Negeri Karimun dilakukan dengan cara *ammonium nitrate* dimasukkan ke dalam lubang galian tanah dan disiram air hingga larut. Selanjutnya *ammonium nitrate* tersebut ditimbun dengan tanah, hal ini bertujuan agar senyawa aktif dari *ammonium nitrate* tersebut hilang.
 - g. Pelaksanaan pemusnahan barang rampasan negara tersebut dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau serta berkoordinasi dengan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Karimun.
 - h. Pelaksanaan putusan pemusnahan barang rampasan dituangkan dalam berita acara pemusnahan barang rampasan negara dan didokumentasikan serta dilaporkan secara

berjenjang kepada Jaksa Agung melalui Kepala PPA, serta tembusan disampaikan kepada Kepala KPKNL Batam dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun.

Pemusnahan terhadap barang rampasan ammonium nitrate hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau seharusnya dilakukan sejak awal tanpa harus melalui proses lelang, pemusnahan seharusnya langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-011/J.A/10/1983 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Khusus Senjata Api, Mesiu dan Bahan Peledak butir 2.3 dan ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan Ammonium Nitrate Hasil Tindak Pidana Penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan *ammonium nitrate* di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau mengalami hambatan sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian

Bahan Peledak Komersial apabila tidak ada izin pengangkutan.³¹

2. Tidak ada aturan khusus yang mengatur barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate*.
3. Pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan harus diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
4. Biaya pemusnahan barang rampasan berupa *ammonium nitrate* yang tinggi.

C. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan *Ammonium Nitrate* Hasil Tindak Pidana Penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* adalah:

1. Kejaksaan Negeri Karimun melakukan edukasi kepada pemenang lelang mengenai pengurusan izin pengangkutan *ammonium nitrate*.³²
2. Perlu adanya aturan khusus mengenai barang rampasan *ammonium nitrate*.
3. Eksekusi harus dilakukan dengan segera dan secara tegas.
4. Diperlukan anggaran khusus untuk pemusnahan barang rampasan *ammonium nitrate* di Kejaksaan Negeri Karimun.

³¹ Wawancara dengan Destia, Jaksa Kejaksaan Negeri Karimun, pada 12 Januari 2022.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilaksanakan melalui: Pengawasan oleh Hakim Wasmat; Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dibuat oleh Kejaksaan dan disampaikan kepada Pengadilan; Aplikasi Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi.
2. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan melalui lelang eksekusi dan pemusnahan. Lelang eksekusi barang rampasan *ammonium nitrate* dilaksanakan melalui KPKNL Batam. Pemusnahan barang rampasan *ammonium nitrate* dilaksanakan dengan cara *ammonium nitrate* dimasukkan ke dalam lubang galian dan disiram air hingga larut, selanjutnya *ammonium nitrate* tersebut ditimbun dengan tanah.
3. Hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* hasil tindak pidana penyelundupan di Kabupaten

³² Wawancara dengan Dhani Ranti, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Karimun, pada 12 Januari 2022.

Karimun Provinsi Kepulauan Riau adalah: Bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial; Tidak ada aturan khusus yang mengatur barang rampasan negara berupa *ammonium nitrate*; Pengeluaran izin pemusnahan barang rampasan harus diterbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia; Biaya pemusnahan barang rampasan berupa *ammonium nitrate* yang tinggi.

4. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan *ammonium nitrate* adalah: Kejaksaan Negeri Karimun melakukan edukasi kepada pemenang lelang mengenai pengurusan izin pengangkutan *ammonium nitrate*; Perlu adanya aturan khusus mengenai barang rampasan *ammonium nitrate*; Eksekusi harus dilakukan dengan segera dan secara tegas; Diperlukan anggaran khusus untuk pemusnahan barang rampasan *ammonium nitrate* di Kejaksaan Negeri Karimun.

B. Saran

Saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah:

1. Diharapkan adanya aturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang rampasan berupa *ammonium nitrate*.
2. Diharapkan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam mengawasi pelaksanaan putusan dapat memberikan peringatan apabila

ditemukan lambatnya pelaksanaan putusan barang rampasan.

3. Diharapkan Kejaksaan sebagai eksekutor tidak berlarut-larut dalam mengeksekusi barang rampasan hasil putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Arliman S, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun, 2021, *Kabupaten Karimun dalam Angka 2021*, BPS Kabupaten Karimun, Karimun.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas-Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- _____, 2018, *Faktor-Faktor yang*

Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Depok.

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

B. Jurnal

Haedar Akib, 2010, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar, Vol. 1, No. 1.

Nugraha Abdul Kadir dan Chaerani Nufus, 2012, "Perlindungan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara dalam Proses Peradilan Pidana", *Lex Jurnalica*, Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul, Vol. 9, No. 1 April.

Richo Sumardana, 2019, "Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No.3 November.

Yohanes Genius Putu Sanjaya, 2019, "Kontra Terorisme Oleh Kepabeanan Indonesia Penyelundupan Amonium Nitrat", *Journal of Terrorism Studies, School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 2 November.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Benda

Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-002/A/J.A/05/2017 Tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak.

D. Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses, tanggal 2 Oktober 2021.